

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan harga bahan pokok di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan sebagian besar komoditas pangan mengalami harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Pemasaran (HAP). Sebagai contoh, pada 27 September 2024, harga beras medium tercatat Rp16.000 per kilogram, melebihi HET Rp11.800, yang berarti harga tersebut 35,59% lebih tinggi dari HET. Demikian pula, harga beras premium mencapai Rp18.000 per kilogram, melebihi HET Rp14.800, atau 21,62% lebih tinggi. Komoditas lain seperti gula pasir, minyak goreng curah, daging ayam ras, dan telur ayam ras juga tercatat memiliki harga di atas HET/HAP, dengan variasi persentase yang berbeda-beda.

Fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi cuaca yang memengaruhi hasil pertanian, gangguan dalam distribusi barang, dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Perubahan harga yang tidak stabil ini dapat menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Dalam upaya pengendalian inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan berbagai langkah konkret, seperti pemantauan harga dan stok barang, operasi pasar murah, serta rapat koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Gangguan Distribusi

Lokasi geografis Kabupaten Raja Ampat yang terpisah-pisah dan terdiri dari pulau-pulau menyebabkan tantangan dalam distribusi barang. Keterbatasan infrastruktur transportasi yang memadai mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi, yang pada akhirnya mempengaruhi harga barang-barang pokok di pasar.

2. Ketergantungan pada daerah lain

Kabupaten Raja Ampat, seperti banyak daerah terpencil lainnya, masih bergantung pada bahan pangan dari luar daerah. Ketergantungan ini menyebabkan harga bahan pokok bisa sangat terpengaruh oleh kebijakan harga dari pusat serta kondisi pasar internasional, seperti kenaikan harga bahan bakar atau gangguan distribusi di jalur perdagangan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

### **Pemantauan dan Pengendalian Harga**

Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara rutin memantau harga-harga bahan pokok di pasar. Pemantauan harga ini dilakukan untuk memastikan bahwa harga barang kebutuhan pokok tetap stabil dan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Pemasaran (HAP) yang ditetapkan pemerintah. Jika terjadi lonjakan

harga, langkah-langkah pengendalian segera diambil.

### **Operasi Pasar Murah**

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pelaksanaan operasi pasar murah. Kegiatan ini dilakukan untuk menyediakan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya yang paling terdampak oleh inflasi. Melalui operasi pasar murah, masyarakat dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil dan lebih rendah dibandingkan harga pasaran.

#### **4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.**

Pasar murah sering kali dilakukan hanya dilakukan menjelang HBKN secara terbatas sehingga penting untuk dipertimbangkan agar dapat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan tidak berfokus hanya pada satu tempat.

#### **5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.**

Pemerintah daerah dan TPID penting untuk dapat mengurangi ketergantungan kebutuhan pangan terhadap daerah lain serta memangkas jalur distribusi untuk dapat menekan harga.